

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS KESEHATAN TAHUN 2024



082169456587



<http://kesehatan.payakumbuhkota.go.id>

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

KATA PENGANTAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Gambaran Umum Dinas.....	2
	1.3 Tugas,dan Fungsi Dinas Kesehatan	4
	1.4 Isu Strategis	21
	1.5 Landasan Hukum	21
	1.6 Sistematika Penulisan	22
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	24
	2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu	24
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	36
	3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	36
	3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	38
	3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja	39
	3.4 Akuntabilitas Keuangan	51
BAB IV	PENUTUP	55

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh tahun 2024 ini merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Renstra Kota Payakumbuh merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2017–2022 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan dan memuat 1 (satu) pernyataan Visi, 2 (dua) pernyataan Misi yang diemban, serta 2 (dua) tujuan dan 5 (lima) sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2024

Sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disusun untuk tahun 2024 dan dengan dukungan anggaran DPA-SKPD Tahun 2024 yang tersedia sebesar Rp. 202.702.011.755 termasuk belanja langsung perkantoran.

Dari evaluasi kinerja secara mandiri (Self Assesment), dari 3 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan seluruhnya, 2 (dua) indikator berhasil sesuai target yang ditetapkan, 1 (satu) indikator kinerja belum tercapai 100%. Untuk itu diperlukan upaya perbaikan/ penyempurnaan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Dinas Kesehatan dan sasaran Pemerintah Daerah

Langkah – langkah yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh untuk mengatasi kendala :

1. Melakukan koordinasi dan advokasi ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat serta Pemerintah Kota Payakumbuh untuk koordinasi kerja kesehatan secara lebih efisien.
2. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan kepada seluruh pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pada masyarakat serta sosialisasi kegiatan program yang menunjang capaian SPM
3. Memotivasi masyarakat khususnya masyarakat miskin untuk memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan dan melaksanakan supervisi ke tempat pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024, walaupun dengan penuh keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini pada dasarnya merupakan amanat dari Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang secara substantif mewajibkan kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai wujud pertanggung jawaban. Serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami sadar bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di tahun mendatang .

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini bermanfaat bagi Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dan juga pihak-pihak berkepentingan dalam mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, 23 Januari 2025
**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PAYAKUMBUH**

Wawan Sofianto, SKM.M.Si
NIP.19811123 200312 1 006

DAFTAR LAMPIRAN

1. REALISASI PROGRAM KERJA 2024
2. FORMULIR PENGUKURAN KINERJA 2024
3. PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2024
4. RENCANA AKSI 2025
5. SK IKU OPD TAHUN 2023-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dalam pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan demikian pembangunan Kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan Pembangunan nasional.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Payakumbuh, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,

berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Dinas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), Dinas Kesehatan merupakan perangkat daerah pelaksanaan urusan wajib pemerintah di bidang kesehatan. Sebagai tindak lanjut dari peraturan pemerintah tersebut, ditetapkan pembentukan dan susunan perangkat daerah pada Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17).

Dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 dimaksud, ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, dimana dijelaskan bahwa Dinas Kesehatan adalah Dinas Daerah yang bertugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan.

1. Dukungan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Untuk melaksanakan urusan wajib, sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Kota Payakumbuh, dapat dilihat dari data pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Sarana dan Prasarana Kesehatan Pemerintah

No.	Sarana	Jumlah	Ket
1	Puskesmas	8	
2	Instalasi /Gudang Farmasi	1	

3	Puskesmas Pembantu	23	
4	Poskeskel	15	
5	Puskesmas Keliling	8	
6	Posbindu	78	
7	Posyandu	171	
8	Rumah Dinas	27	
9	Kendaraan roda 2	26	
	Kendaraan roda 4	14	

Sumber Data : Profil Dokumen SDM Kesehatan Tahun 2024

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana Swasta

No.	Sarana	Jumlah	Ket.
1	Rumah Sakit Umum	1	
2	Rumah Sakit Swasta	3	
3	Klinik bersalin	2	
4	Klinik pertama	13	
5	Klinik utama	5	
6	Tempat Praktek Mandiri Dokter (TPMD)	17	
7	Tempat Praktek Mandiri Dokter gigi (TPMDG)	28	
8	Tempat Praktek Mandiri Dokter Spesialis (TPMDS)	24	
9	Praktek Mandiri Bidan (PMB)	21	
11	Posyandu	171	
12	Optikal	15	
13	Apotik	60	
14	Toko Obat	4	

Sumber Data : Profil Dokumen SDM Kesehatan Tahun 2024

2. Data Personil

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai/Tenaga pada Dinas Kesehatan

N O	RUMPUN SDMK	DINAS KESEHA TAN		PUSKES MAS		RUMAH SAKIT		SARANA KEFARM ASIAN DAN ALKES		TOTAL	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
I.	TENAGA KESEHATAN										
1	Medis	-	1	6	40	26	55	-	-	32	96

2	Keperawatan	-	2	3	54	56	172	-	-	59	228
3	Kebidanan	-	2	-	113	-	44	-	-	-	159
4	Kefarmasian	-	1	2	21	7	30	1	3	10	55
5	Kesehatan Masyarakat	-	14	4	24	1	6	-	-	5	44
6	Kesehatan Lingkungan	-	1	4	7	1	3	-	-	5	11
7	Gizi	-	-	-	15	-	12	-	-	-	27
8	Keterapian Fisik	-	-	-	-	2	3	-	-	2	3
9	Keteknisian Medis	-	1	3	26	10	24	-	-	13	51
10	Teknik Biomedika	-	-	2	12	12	22	-	-	14	34
II.	ASISTEN TENAGA KESEHATAN	-	-	1	2	-	1	-	-	1	1
III.	TENAGA PENUNJANG	10	33	20	32	66	96	4	-	100	161
	TOTAL	10	55	45	346	181	468	5	3	241	872

Sumber Data : Profil Dokumen SDMK Tahun 2024

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17) dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh mempunyai tugas dan kewajiban membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan, yang meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular, penyehatan lingkungan, pelayanan medik, kesehatan masyarakat, pendataan dan pengembangan informasi kesehatan, keluarga sejahtera serta pembangunan kesehatan masyarakat sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- b. Pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang kesehatan, yang meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular, penyehatan lingkungan, pelayanan medik,

kesehatan masyarakat, pendataan dan pengembangan informasi kesehatan, keluarga sejahtera serta pembangunan kesehatan masyarakat;

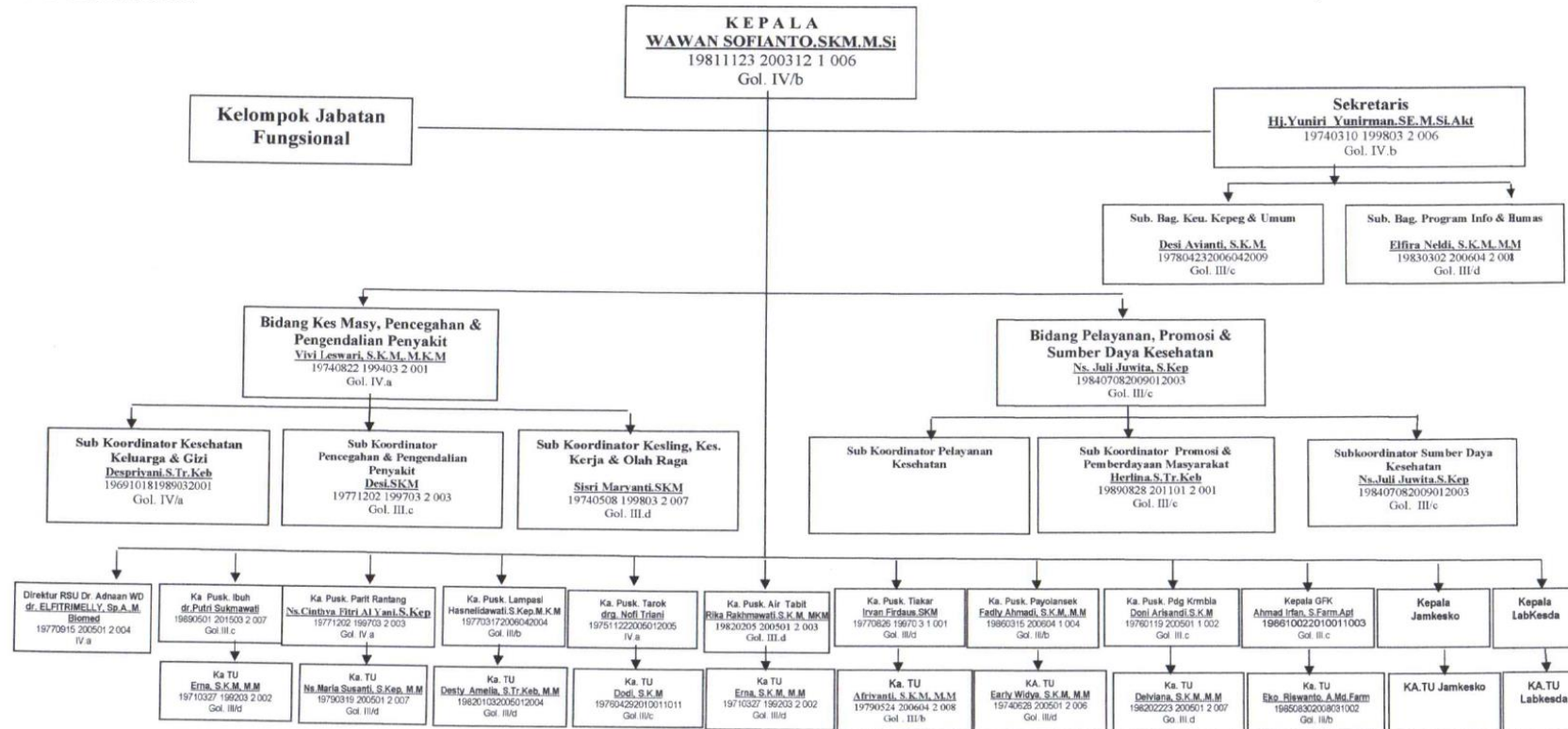
- c. Pengelolaan perijinan di bidang kesehatan, yang meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular, penyehatan lingkungan, pelayanan medik, kesehatan masyarakat, pendataan dan pengembangan informasi kesehatan, keluarga sejahtera serta pembangunan kesehatan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang kesehatan, yang meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular, penyehatan lingkungan, pelayanan medik, kesehatan masyarakat, pendataan dan pengembangan informasi kesehatan, keluarga sejahtera serta pembangunan kesehatan masyarakat;
- e. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang kesehatan, yang meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular, penyehatan lingkungan, pelayanan medik, kesehatan masyarakat, pendataan dan pengembangan informasi kesehatan, keluarga sejahtera serta pembangunan kesehatan masyarakat;
- f. Pengaturan, pengendalian dan pembinaan terhadap UPT dan Puskesmas dalam lingkup Dinas Kesehatan;
- g. Penyelenggaraan ketatausahaan Dinas Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :

Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang P3 Kesehatan Masyarakat;
- d. Bidang P2SDK
- e. Puskesmas
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KOTA PAYAKUMBUH



1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan tugas perbantuan yang diberikan kepala daerah. Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Menetapkan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sarana prasarana kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan sumberdaya kesehatan
- b. Menyelenggarakan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sarana prasarana kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan sumberdaya kesehatan
- c. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi, pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sarana prasarana kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan sumberdaya kesehatan
- d. Menyelenggarakan dukungan substantive kepada seluruh unsure organisasi di lingkungan dinas
- e. Pengguna anggaran dinas
- f. Pengguna barang dinas
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas. Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi perumusan kegiatan dinas;
- b. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran dinas;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan aset, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas;
- d. Melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;

- e. Melaksanakan koordinasi dan perumusan penyusunan peraturan serta pelaksanaan advokasi;
- f. Melaksanakan pengelolaan barang milik negara atau daerah;
- g. Mengelola layanan informasi dan dokumentasi publik;
- h. Mengelola layanan pengaduan masyarakat; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan dan penyusunan peraturan dan pelaksanaan advokasi, pengelolaan urusan umum, keuangan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Penjabaran tugas Sub Bagian Umum, keuangan dan Kepegawaian adalah :

- a. Menyusun rencana kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman, serta bahan lain yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian;
- c. Melakukan penyiapan konsep dan tata naskah dinas di bidang administrasi perkantoran dan kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan atasan;
- d. Melakukan penyiapan konsep dan tata naskah dinas di bidang administrasi perkantoran dan kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan atasan;
- e. Melakukan pengadaan kebutuhan peralatan atau perlengkapan kantor;
- f. Melakukan pengumpulan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian;

- g. Melakukan pemeliharaan dan perawatan ruang kerja, ruang rapat, ruang pertemuan, sarana dan prasarana kantor dan barang habis pakai;
- h. Melakukan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor, serta pelayanan kerumahan tanggaan lainnya;
- i. Melakukan fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
- j. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian, membuat daftar urut pegawai;
- k. melakukan koordinasi dan melaporkan kehadiran pegawai;
- l. menyusun penerbitan surat keputusan dalam jabatan fungsional dan mengurus urusan kepegawaian pada jabatan tersebut;
- m. mengerjakan fasilitasi usulan pengangkatan, kesejahteraan pegawai, pemberian penghargaan, pemberian sanksi dan atau hukuman, dan pelatihan penjenjangan pegawai;
- n. memproses keperluan dan kebutuhan administrasi kepegawaian dalam hal penataan kinerja pegawai serta pengurusan administrasi angka kredit dan pelayanan lainnya;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas staf sub bagian umum dan kepegawaian pada atasan;
- p. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan, dan evaluasi jabatan;
- q. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- r. menyusun dan mengelola keuangan dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. mempelajari dan menelaah peraturan tentang keuangan dinas;
- t. menyusun rencana penclapatan dan belanja tidak langsung dinas;
- u. melakukan koorclinir pengadministrasian keuangan dinas terhadap belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan, serta belanja modal, belanja aparatur dan publik;
- v. melakukan pertanggungjawaban pencairan dana;
- w. melakukan verifikasi anggaran pendapatan belanja dinas;
- x. mengerjakan dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan atau anggaran pendapatan dan belanja dinas termasuk perhitungan anggaran;

- y. melakukan pembinaan dan pengendalian satuan pemegang kas; melaksanakan pengendalian administrasi barang, aset, dan perlengkapan dinas;
- z. melakukan koordinir dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan dan asset;
- å. melakukan pemantauan, pencatatan barang dan pelaksanaan administrasi aset, barang inventaris, kendaraan dinas, rumah dinas serta menyelenggarakan usulan penghapusan asset;
- ä. menyusun laporan terkait urusan keuangan, penganggaran, dan aset dinas; dan
- ö. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2) Sub Bagian Program, Informasi dan Humas

Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan pengelolaan data dan informasi, monitoring dan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan. Penjabaran tugas Sub Bagian Program adalah :

- a. menyusun rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk program dan kegiatan dinas;
- b. melakukan penyusunan program dengan menyiapkan bahan penyusunan rencana umum jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c. melakukan penghimpunan dan fasilitasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- d. melakukan penghimpunan, menganalisa, dan menyusun laporan evaluasi program dan kegiatan dinas;
- e. melakukan pengelolaan sistem informasi kesehatan;
- f. melakukan pengelolaan informasi lintas program dan lintas sektor;
- g. menyusun kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem informasi, pengelolaan teknologi informasi dan pengelolaan data;
- h. melakukan pelaksanaan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat serta hubungan masyarakat;
- i. melakukan rekapitulasi laporan pencapaian program dan kegiatan dinas;

- j. melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas;
- k. menyusun laporan sub bagian program dan informasi untuk disampaikan kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi, kesehatan lingkungan, upaya kesehatan sekolah, kesehatan kerja dan olah raga;
- b. menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang kesehatan keluarga, gizi, kesehatan lingkungan, upaya kesehatan sekolah, kesehatan kerja dan olah raga;
- c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kesehatan keluarga, gizi, kesehatan lingkungan, upaya kesehatan sekolah, kesehatan kerja dan olah raga;
- d. memantau, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi, kesehatan lingkungan, upaya kesehatan sekolah, kesehatan kerja dan olah raga;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan bidang kesehatan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3.1) Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan gizi

Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dipimpin oleh seorang Sub Koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala

Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga. Penjabaran tugas Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan gizi adalah :

- a. melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak pra sekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana;
- b. melakukan pembinaan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak pra sekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana;
- c. melakukan pembinaan tenaga kesehatan penolong persalinan;
- d. melakukan audit maternal dan perinatal;
- e. melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga;
- g. melakukan upaya kesehatan sekolah di tingkat sekolah dasar dan sederajat, sekolah menengah pertama dan sederajat, sekolah menengah atas dan sederajat;
- h. melakukan bimbingan teknis ke Puskesmas, klinik, bidan praktek mandiri (BPM) dan rumah sakit;
- i. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- j. merencanakan kegiatan yang berhubungan dengan promosi kesehatan dan gizi masyarakat serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan penanggulangan gizi masyarakat;
- k. melakukan peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan pengelolaan konsumsi gizi;
- l. melakukan pemantauan status gizi anak balita dan ibu hamil di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan jejaringannya, serta posyandu;
- m. melakukan pemantauan pendistribusian vitamin A kepada balita, ibu nifas dan masalah gizi lainnya;
- n. merancang perencanaan dan melaksanakan pemberian makanan tambahan pada kasus kekurangan energi protein dan kekurangan energi kronis pada ibu hamil;

- o. melakukan pembinaan pemberian ASI eksklusif dan klinik laktasi; dan
- p. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3.2) Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksana kebijakan penyehatan lingkungan operasional, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga. Penjabaran tugas Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga adalah:

- a. melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan penyehatan lingkungan dan sanitasi dasar, hygiene, dan sanitasi pangan dan sanitasi tempat umum/tempat pengelolaan makanan;
- b. melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan kesehatan okupasi dan survailens, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olah raga;
- c. merancang rencana melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- d. melakukan penyiapan penyusunan bahan kegiatan dan bimbingan teknis serta supervisi kapasitas kerja pekerja dan institusi;
- e. melakukan penyiapan pelaksanan kegiatan dan bimbingan teknis supervisi kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, okupasi dan survailans kapasitas kerja, lingkungan kerja;
- f. melakukan kegiatan, pembinaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyehatan air dan sanitasi dasar penyehatan pangan, dan penyehatan udara dan kawasan, serta pengawasan limbah dan radiasi;
- g. melakukan pengendalian lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi;
- h. melakukan kegiatan kesehatan keolahragaan masyarakat;

- i. melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kualitas air, Perusahaan Daerah Air Minum, depot air minum isi ulang, dan sumber air lainnya serta air badan air, kolam renang, pemandian umum;
- j. melakukan pembinaan terhadap kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan Kader Kesehatan Lingkungan;
- k. melakukan pengawasan hygiene dan sanitasi di tempat-tempat umum dan tempat pengolahan atau penyediaan makanan;
- l. melakukan pengawasan dan pembinaan sanitasi pada lingkungan pemukiman, pembinaan kota sehat dan pengawasan sampah medis;
- m. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program yang menyangkut analisis dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan hidup, dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
- n. memproses penerbitan rekomendasi laik sehat bagi sarana tempat umum, tempat pengelolaan makanan, dan pestisida;
- o. melakukan pengelolaan laboratorium air pada dinas;
- p. menyusun laporan tahunan kesehatan lingkungan; dan
- q. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3.3) Sub Koordinator pencegahan dan pengendalian penyakit

Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang Sub Koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, dan bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Penjabaran tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah:

- a. melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung;

- b. melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan dan pengendalian menular langsung, penyakit bersumber binatang dan vektor;
- c. merancang rencana kegiatan pemberantasan penyakit menular;
- d. melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pemapasan akut, HIVAIDS, infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung;
- e. merancang rencana kebutuhan obat dan sarana program penyakit menular;
- f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pemberantasan penyakit menular ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut beserta jaringannya;
- g. melakukan monitoring dan bimbingan teknis program pengendalian dan pemberantasan penyakit menular ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas tingkat lanjut beserta jejaringnya;
- h. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengendalian dan pemberantasan penyakit menular ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas tingkat lanjut beserta jejaringnya;
- i. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, kesehatan lanjut usia dan narkotika psikosomatik zat adiktif;
- j. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, kesehatan lanjut usia dan NAPZA;
- k. melakukan penyiapan bahan Bimbingan teknis di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, kesehatan lanjut usia dan NAPZA;
- l. melakukan pertemuan evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular,
- m. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, kesehatan lanjut usia dan NAPZA;

- n. melakukan koordinasi dalam pengendalian wabah, bencana, imunisasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, kesehatan lanjut usia dan NAPZA;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. menyusun laporan program penyakit menular;
- q. melakukan penyiapan pelaksanaan kegiatan surveilans wabah dan bencana, penyakit infeksi emerging, kesehatan haji dan imunisasi;
- r. melakukan penyiapan, pelaksanaan kegiatan surveilans wabah dan bencana, penyakit infeksi emerging, kesehatan haji, dan imunisasi;
- s. melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kegiatan surveilans wabah dan bencana, penyakit infeksi emerging, kesehatan haji dan imunisasi;
- t. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan surveilans wabah dan bencana, penyakit infeksi emerging, kesehatan haji, imunisasi;
- u. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan wabah;
- v. merancang rencana kegiatan sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana;
- w. melakukan penyelidikan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan penyakit yang berpotensi wabah serta keracunan;
- x. melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap calon jamaah haji;
- y. melakukan penghimpunan dan menganalisa data surveilans, kejadian luar biasa, wabah dan bencana dari rumah sakit dan puskesmas;
- z. melakukan koordinir penanggulangan kejadian luar biasa;
- å. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes melitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional;
- ä. melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan tentang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia dan penyalahgunaan NAPZA;

- ö. melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi tentang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia dan penyalahgunaan NAPZA;
- aa. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia dan penyalahgunaan NAPZA; dan
- bb. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan

Bidang Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, serta pengadaan sarana dan prasarana kesehatan, alat kesehatan, jaminan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. merumuskan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, sarana prasarana kesehatan, alat kesehatan, jaminan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- b. merumuskan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, sarana prasarana kesehatan, alat kesehatan, jaminan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- c. melaksanakan bimbingan teknis di bidang kefarmasian, sarana prasarana kesehatan alat kesehatan, jaminan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- d. melaksanakan pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang kefarmasian, sarana prasarana kesehatan, alat kesehatan, jaminan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1) Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan

Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan . Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi. Penjabaran tugas Seksi Pelayanan Kesehatan adalah :

- a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan
- b. merencanakan program kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan;
- c. melaksanakan program kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan;
- d. membagikan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan;
- e. membuat laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Pelayanan Kesehatan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4.2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Sub Koordinator Promosi Kesehatan dipimpin oleh seorang Sub Koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Penjabaran tugas Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat adalah :

- a. melakukan pengelolaan produksi komunikasi publik tentang program kesehatan melalui peliputan, pendokumentasian, dan pengolahan bahan publikasi program kesehatan;
- b. memantau, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan penanggulangan gizi masyarakat;

- c. membina dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, Polindes, Pos Kesehatan Kelurahan, Pos Pembinaan terpadu, Pos Lanjut Usia, Tanaman Obat keluarga, Pos Upaya Kesehatan Kerja, Pos Kesehatan Pesantren, dan Saka Bhakti Husada; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan promosi Kesehatan masyarakat;

4.3) Sub Koordinator Sumber Daya Kesehatan

Sub Koordinator Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Sub Koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan. Seksi Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Sumber Daya Kesehatan. Penjabaran tugas Sub Koordinator Sumber Daya Kesehatan adalah :

- a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Sumber Daya Kesehatan;
- b. Perencanaan program kegiatan Seksi Sumber Daya Kesehatan;
- c. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Sumber Daya Kesehatan;
- d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Sumber Daya Kesehatan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. UPTD Instalasi Farmasi

UPTD Instalasi Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan. UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian. Penjabaran tugas UPTD Instalasi Farmasi adalah:

- a. melakukan perencanaan, pengadaan, pengawasan obat;
- b. melakukan pembinaan manajemen pengelolaan obat di puskesmas dan puskesmas pembantu;

- c. melakukan perencanaan dan pendistribusian obat;
- d. melakukan pemeriksaan, monitoring obat pada puskesmas, puskesmas pembantu, dan pos kesehatan keliling;
- e. melakukan pengelolaan kegiatan laik sehat pangan, Industri Pangan Rumah Tangga dan rekomendasi apotik, toko obat, dan perbekalan kesehatan;
- f. melakukan pengawasan dan registrasi obat, makanan dan minuman produksi rumah tangga, apotik, toko obat;
- g. melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan evaluasi, penanggung jawab peredaran obat atau sediaan farmasi, napza, kosmetik, obat tradisional di puskesmas, puskesmas pembantu, apotik, toko obat, dan toko obat tradisional;
- h. melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan evaluasi, terhadap pengelola toko makanan, minuman, dan sarana produksi industri rumah tangga;
- i. melakukan pengambilan sampel atau contoh sediaan farmasi di lapangan;
- j. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi kefarmasian untuk disampaikan kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pada dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

3. Jabatan Fungsional

Pada dinas dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1.4 Isu Strategis

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pelayanan di bidang kesehatan diantaranya dari telaahan gambaran pelayanan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, sasaran jangka menengah K/L dan Provinsi serta implikasi RT RW dan KLHS dijadikan sebagai dasar dalam penentuan isu–isu strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat
2. Peningkatan nilai Indeks Keluarga Sehat
3. Penurunan angka kesakitan akibat penyakit tidak menular dan penyakit menular yang berpotensi KLB.
4. Peningkatan capaian indikator SPM (kesehatan usia produktif, lansia, orang dengan TB dan orang beresiko terinfeksi HIV)
5. Peningkatan pelaksanaan gernas di masyarakat.
6. Peningkatan Kemandirian masyarakat hidup sehat

1.5 Landasan Hukum

LKjIP Kota Payakumbuh ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

1.6 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis dan perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan mempedomani dokumen perencanaan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

Bab ini menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini yang dikemukakan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh untuk meningkatkan kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya

2.1 Perencanaan Strategis

1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang ditetapkan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Penetapan jangka waktu 4 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana

Strategis Kota Payakumbuh dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPD, Forum Renja OPD, sehingga Renstra Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

a. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Payakumbuh dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Payakumbuh sebagai Kota Jasa "Payakumbuh Maju, Sejahtera dan Bermartabat, dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang".

Visi Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah :
"Masyarakat Payakumbuh yang Mandiri untuk Hidup Sehat dan Sejahtera melalui Pelayanan Kesehatan yang Bermutu".

Penjelasan pernyataan Visi Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh 2023-2026 yaitu:

- a) Penyehatan masyarakat yang utama adalah untuk Masyarakat Kota Payakumbuh untuk hidup dalam Lingkungan yang sehat, meliputi lingkungan tempat tinggal, rumah, sekolah, pasar, tempat ibadah dan sarana-sarana umum lainnya.

- b) Masyarakat hidup dengan pola perilaku sehat dalam 8 tatanan kesehatan yang sesuai dengan Gaya Hidup Sehat ber-PHBS yakni tatanan rumah tangga, tatanan perkantoran, tatanan tempat ibadah, tatanan tempat usaha (home industri), tatanan pasar, tatanan sekolah (pendidikan), tatanan pariwisata, tatanan restoran /tempat makan.
- c) Dukungan pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam artian dukungan dari SDM kesehatan yang profesional, sarana kesehatan yang mencukupi, pembiayaan kesehatan yang memadai dan mutu pelayanan kesehatan yang semakin baik.

b. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a) Menggerakkan pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan.
- b) Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau secara paripurna dengan berpedoman kepada etika dan profesionalisme.

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

1) Tujuan

Terwujudnya profesionalisme dan komitmen Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dalam program dan kerja sama lintas sektoral, menggalang kemitraan guna

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, peran serta masyarakat yang dinamis, terbinanya perilaku hidup sehat untuk tercapainya Payakumbuh Sehat.

Secara teknis, tujuan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh adalah :

"Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal"

2) Sasaran sebagai hasil kinerja terukur yang diharapkan dalam pelaksanaan rencana strategis ini dijabarkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, Pengendalian penyakit menular dan tidak menular
- b. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat
- c. Meningkatkan cakupan jaminan kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam penjaminan kesehatan
- d. Meningkatkan standar layanan kesehatan masyarakat
- e. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- f. Meningkatkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Strategis dan Kebijakan

1) Strategi Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh 2023-2026 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, Pengendalian penyakit menular dan tidak menular
- b. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat
- c. Meningkatkan cakupan jaminan kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam penjaminan kesehatan
- d. Meningkatkan standar layanan kesehatan masyarakat
- e. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- f. Meningkatkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Strategis dan Kebijakan

2) Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh 2023-2026 sebagai berikut:

- a. Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP
- b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
- c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
- d. Penerbitan dan perpanjangan Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- e. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan
- f. Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan

- g. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan
- h. Pengendalian, Pengawasan dan Pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko alat kesehatan, dan Optik al Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- i. Pembinaan, Pengawasan dan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT
- j. Pembinaan, Pengawasan dan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM)
- k. Penertiban striker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan
- l. Peningkatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
- m. Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten / kota, Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indicator dan target Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun				Ket
				Target Capain				
				2023	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	0,4	0,5	0,6	0,7	IKU
			Prevalensi Stunting pada Balita	5,54	5,52	5,51	5,50	IKU
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Inspektorat	A	A	AA	AA	IKU

1. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Payakumbuh NomoR 060.2/177/wk-Pyk/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh tahun 2023-2026, Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh No : 440/56/Sekre-PIH/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 4);

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026 adalah seperti yang bagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN
				ALASAN	FORMULA /CARA PENDUKUNG	SUMBER DATA	
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	Tahun	Merupakan indikator yang menjadi tolak ukur pencapaian kinerja dinas kesehatan yang diselaraskan dengan target provinsi dan pencapaian program prioritas nasional bidang kesehatan	Perhitungan 12 indikator keluarga sehat dari setiap keluarga yang besarnya berkisar antara 0 sampai dengan 1 yang terdiri dari : 1. Keluarga mengikuti KB 2. Ibu bersalin di Fasyankes 3. Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap 4. Bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan 5. Memantau pertumbuhan balita setiap bulan 6. Penderita TB paru berobat sesuai standar 7. Penderita hipertensi berobat secara teratur 8. Gangguan jiwa berat tidak ditelantarkan 9. Tidak ada anggota	Permenkes No. 39 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan PISPK	Nilai IKS ini merupakan akumulasi dari nilai 12 indikator PIS PK dan dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yakni: *Keluarga Sehat bila nilai IKS > 0,8, *Keluarga Pra Sehat bila nilai IKS 0,5 â€“ 0,8 dan *Keluarga Tidak Sehat bila nilai IKS < 0,5.

					keluarga yang merokok 10. Keluarga mempunyai akses terhadap air Bersih 11. Keluarga mempunyai akses/menggunakan jamban sehat 12. Sekeluarga menjadi peserta JKN/Askes		
		Prevalensi Stunting	%	Target Nasional penurunan prevalensi stunting setiap tahun harus berkisar 2,7 %	Jumlah anak balita stunting dibawah 5 tahun dibagi jumlah anak balita dikali 100 persen $\text{JAB}(5) \text{ SP}$ $\text{PAB}(5) = \frac{\text{JAB}(5)}{\text{JAB}(5)} \times 100\%$ $\text{SP Stunting} = \frac{\text{JAB}(5)}{\text{JAB}(5)}$ $\text{PAB}(5) \text{ SP Stunting} = \text{Prevalensi Anak Balita yang menderita Sangat Pendek (stunting)}$ $\text{JAB}(5) \text{ SP Stunting} = \text{Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu}$ $\text{JAB}(5) = \text{Jumlah anak balita}$	Perpres No 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting	Stunting adalah kondisi anak memiliki dibawah standar usianya. Stunting merupakan salah satu indikator gagal tumbuh balita akibat kekurangan gizi kronis pada periode 1000 hari pertama kehidupan

					pada waktu yang sama		
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		Target pemerintah Kota Payakumbuh untuk peningkatan capaian kinerja perangkat daerah	Hasil evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh pada periode waktu tertentu	Inspektorat	

2. Perjanjian Kinerja 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks keluarga sehat	Th	0,5
		Prevalensi balita stunting	Org	5,52
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kategori	A

Tabel 2.4
Program Penunjang Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
Tahun 2024

Program	Anggaran		Keterangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Rp	167.271.039.939	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Rp	33.225.884.964	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM KESEHATAN	Rp	788.345.952	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN	Rp	378.944.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp	1.037.796.900	

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan ditunjang dengan adanya 5 Program dan anggaran sebesar Rp.202.702.011.755

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Permenpan nomor 88 thn 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian

sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 86 tahun 2017, sebagai berikut

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
Tahun 2023

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026 maupun Rencana Kerja

Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 440/56/Sekre-PIH/2023 , telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor : 4 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh tahun 2023- 2026, Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh No : 440/56/Sekre- PIH/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2023- 2026. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2024 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Keluarga Sehat	thn	0,4	0,35	70
2	Prevalensi balita Stunting	thn	5,52	2,09	162,14
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kategori	A	A	100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada 1 indikator yaitu prevalensi balita stunting dengan capaian kinerja 2,09 (162,14 %) dimana target yang di tetapkan 5,52(100%)

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada 1 indikator : yaitu pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan capaian kinerja A. 100,00%

Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada 1 indikator yaitu indeks keluarga sehat Dimana capaian kinerja nya baru mencapai 0,35 (70%) dari taget yang di tetapkan pada tahun 2024 yaitu 0,4 (100 %)

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2023-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 sebanyak 2 (dua) sasaran.

Tahun 2024 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, dari 2 (2) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran

Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	33, 33 % (1 Indikator)
2	Sesuai Target	33, 33 % (1 Indikator)
3	Tidak Mencapai Target	33, 33 % (1 Indikator)

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
Tahun 2024

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Realisasi rata-rata(%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	2 Indikator	116,07%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	1 Indikator	100 %

Dari 2 (dua) Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target misi yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui Target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
A.	Misi 3, Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas melalui perbaikan mutu pendidikan,derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial	2	1	50 %			1	50 %

B.	Misi 2, Mewujudkan tata peemrintah daerah yang baik,demaokratis, berlandaskan hukum dan di laksanakan secar partisipatif	1	0	%	1	100 %	-	%
	Total	3	1	33,33 %	1	33,33 %	1	33,33 %

Dari 2 sasaran dengan 3 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase
A.	Misi 1	2	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	50 %
2	Sesuai Target	0	%
3	Tidak Mencapai Target	1	50%
B.	Misi 2	1	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	%
2	Sesuai Target	1	100%
3	Tidak Mencapai Target	0	%

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- a. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- b. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- c. Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- d. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- e. Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 sasaran dan 3 indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh tahun 2023-2026, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1 tahun 2024
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Keluarga Sehat	thn	0,4	0,35	70
2	Prevalensi balita Stunting	thn	5,52	2,09	162,14

Sasaran 1 meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dapat dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu :Indeks Keluarga Sehat dan prevalensi balita stunting sesuai indikator kinerja utama yang di tetapkan sesuai renstra tahun 2023-2026

Capaian kinerja nyata indikator indeks keluarga sehat adalah sebesar 0.35 dari target sebesar 0.4 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 70 % atau dibawah target yang diperjanjikan. Faktor yang berkontribusi dalam mencapai Indikator pertama ini adalah adanya 12 indokator SPM yang beririsan dengan 12 indikator PISPK(Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga) yang terdiri dari:

1. Keluarga mengikuti program KB
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan
3. Bayi mendapat imunisasi dasar yang lengkap
4. Balita mendapat pemantauan pertumbuhan
5. Bayi mendapat ASI eksklusif
6. Penderita TBC mendapat pengobatan sesuai standar
7. Penderita hipertensi rutin menjalani pengobatan

8. Penderita gangguan jiwa tidak terlantar dan mendapat pengobatan
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok
10. Keluarga merupakan anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
11. Keluarga memiliki akses ke sarana air bersih
12. Keluarga memiliki akses atau menggunakan jamban bersih

Sedang faktor lain seperti, kemiskinan, ekonomi dan pendidikan merupakan crosscutting dengan OPD lainnya

Capaian kinerja nyata indikator Prevalensi Balita Stunting adalah sebesar 192 balita atau 2,09 target yang ditetapkan tahun 2024 dari jumlah sasaran balita 9203 (5,52) balita yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 162,14% atau melebihi dari target yang diperjanjikan. Capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya. Di sebabkan adanya dukungan Dana dari DAK dan DAU dalam menu PMT Lokal dan PMT pemulihan selain itu juga banyak nya supporting dari semua OPD yang menjadi crosscutting dalam pengentasan balita sejak tahun 2022

Tahun 2024 adalah tahun ke dua Renstra, periode 2023-2026 capaian Tahun 2024 sebesar 116,07 % bila dibandingkan dengan target tahun 2023 maka capaian kinerjanya menurun di karenakan pada tahun 2023 indikator indeks keluarga sehat capaian nya di bawah target kinerja utama yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan pada tahun 2024 dan tertera di Renstra Dinas Kesehatan periode 2023-2026 namun secara keseluruhan capaian kinerja dinas Kesehatan tahun 2024 bernilai baik

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang /Kurang
1	Program pemenuhan UKP dan UKM	1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan	7,010,783,119	6,444,364,127	Tersedianya fasilitas pelayanan UKM dan UKP sesuai standar	Menunjang

		Daerah Kab/Kota				
		2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Dasar & Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	26,111,323,445	24,117,637,719	Tersedianya layanan Kesehatan UKM dan UKP sesuai standar	Menunjang
		3. Penyelenggaraa n Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	103,778,400	60,384,000	Tersedianya sistem informasi Kesehatan yang terintegrasi dan update	Menunjang
2	Program Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	1. Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM manusia di wilayah kabupaten / kota	197,726,302	112,297,295	Terpenuhinya SDM untuk kegiatan UKP dan UKM di Kota Paykumbuh sesuai standar	Menunjang
		2. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten / kota	590,619,650	509,405,270	Terpenuhinya SDM yang kompeten untuk kegiatan UKP dan UKM di Kota Paykumbuh sesuai standar	Menunjang
3	Program	1. Penertiban sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P- IRT sebagai izin produksi, untuk produk	378,944,000	271,127,925	Terlaksananya pengawasan terhadap sertifikat produksi pangan sesuai standar	Menunjang

	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan dan minuman	makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga				
4	Program pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	1. Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten / kota	778,186,400	753,727,860	Meningkatnya peran serta Masyarakat lintas sektor dan lintas OPD Tingkat Kota	Menunjang
		2. Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten / kota	20,919,650	18,923,110	Peningkatan pola hidup sehat pada keluarga dan sekolah	Menunjang
		3. Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten / kota	238,690,850	205,255,530	Terlaksananya kegiatan suoversi dan bimtek pada UKBM yang ada	Menunjang

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 1; Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Meningkatnya sosialisasi serta kemitraan OPD yang menjadi crosscutting Dinas Kesehatan, Sekolah, posyandu dan di setiap kelurahan dalam rangka peningkatan capaian 12 indikator PIS PK yang menjadi standar capaian indeks Keluarga sehat
2. Meningkatnya sosialisasi serta kemitraan OPD yang menjadi crosscutting Dinas Kesehatan, Sekolah, posyandu dan di setiap kelurahan dalam rangka peningkatan capaian 12 indikator Standar Pelayanan minimal
3. Tersedianya anggaran APBD dan DAK non fisik (BOK Kota, BOK Puskesmas) dalam upaya pelaksanaan PIS PK dan SPM

4. Komitmen lintas OPD dan sektor dalam penanganan balita stunting yang ditunjukkan dengan dibentuknya TPPS (Tim percepatan penanggulangan stunting) dan meningkatnya kesadaran masyarakat di kelurahan melalui keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan Bapak asuh, Aksi bergizi, Aksi Bumil sehat (gerakan masyarakat sehat).

Faktor Penghambat

1. Masih kurangnya sarana prasarana posyandu dan puskesmas dalam deteksi dini bumil dan bayi baru lahir.
2. Sumber daya kesehatan yang masih kurang pemahamannya secara komprehensif / menyeluruh terkait deteksi dini kehamilan beresiko, deteksi dini Balita stunting
3. Pemeriksaan kesehatan secara berkala diposyandu dan Posyandu remaja masih belum optimal dikarenakan peran serta masyarakat masih kurang.
4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat membawa balita ke posyandu
5. Kurangnya partisipasi lintas sektor dalam mendukung kegiatan posyandu
6. Belum keseluruhan indikator dari PISPK dan SPM terakumulasi 100 persen di masyarakat.

Upaya dan rekomendasi tindak lanjut

1. Meningkatkan Pengembangan sumber daya kesehatan dengan workshop/pelatihan
2. Membuat perencanaan anggaran untuk melengkapi sarana di posyandu, puskesmas dan jaringannya
3. Sosialisasi dan revitalisasi kompetensi kader posyandu di tingkat kelurahan
4. Melibatkan lintas sektor dalam intervensi PISPK dan SPM di tingkat kelurahan
5. Memberikan reward kepada kader kesehatan yang terlibat dalam kegiatan upaya peningkatan derajat kesehatan

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran 1 ; Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.8
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja
Sasaran 1 ; Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	(%)	No	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat	1.1	Indeks Keluarga Sehat	Tahun	0.4	0.35	70.00	1	Program pemenuhan UKP dan UKM	33.225.884.964	30.622.385.846	92.16
		1.2	Prevalensi balita stunting	kasus	5.52	2.17	162.14	2	Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan	788.345.952	621.702.565	78.86
								3	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman	378.944.000	271.127.925	71.55
								4	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	1.037.796.900	977.906.500	94.23
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 8 INDIKATOR						116.07	TOTAL PER SASARAN	35.430.971.816	32.493.122.836	91.71
		TINGKAT <u>EFISIENSI</u>					24.36					
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u>				126.56								

Dari data dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran 1 ; Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat,1(satu) indikator masih dibawah target dan 1 (satu) indikator sudah melampaui target yang ditetapkan, dengan tingkat efisiensi berada pada posisi 24,36%, dimana serapan anggaran rendah, namun dari tingkat efektifitas 126,56% sudah baik. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang kondisi ini perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan. Keberhasilan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dalam pencapaian kinerja sasaran 1 disebabkan berbagai faktor dan intervensi dalam pelaksanaan program, diantaranya :

1. Meningkatnya SDM dan Kompetensi petugas dalam penanganan balita sesuai standar dan penjangkaran kasus stunting balita pendek serta konseling ibu dengan balita resiko tinggi, dan sosialisasi bumil sampai ibu nifas pasca melahirkan.
2. Meningkatnya sosialisasi serta kemitraan posyandu dan PAUD di setiap kelurahan dalam rangka peningkatan penjangkaran balita pendek
3. Tersedianya anggaran APBD melalui DAK non fisik (BOK Puskesmas dan BOK Kota) dalam menangani kasus ibu hamil beresiko dan penanganan balita stunting.
4. Komitmen lintas OPD dan sektor dalam penanganan balita stunting yang ditunjukkan dengan di bentuk nya TPPS (Tim percepatan penanggulangan stunting) dan meningkatnya kesadaran masyarakat di kelurahan melalui ke ikutsertaan masyarakat dalam kegiatan Bapak asuh, Aksi bergizi,Aksi Bumil sehat (gerakan masyarakat sehat).
5. Meningkatnya sosialisasi Sanitasi terkait kesehatan lingkungan di masyarakat tidak saja melalui Kampanye namun juga di posyandu dan posbindu yang terbentuk
6. Memasyarakatkan program gerakan masyarakat sehat dengan menfokuskan 7 kegiatan gerakan masyarakat sehat untuk mencapai Indeks keluarga sehat Kota Payakumbuh yang terus meningkat.
7. Adanya kegiatan Inovativ dari berbagai program yang mendukung sasaran 1 di setiap Puskesmas dan Bidang

Selanjutnya dalam upaya meningkatkan efisiensi capaian kinerja, direkomendasikan dalam penetapan alokasi anggaran terutama yang dibiayai melalui APBN (Program DAK) agar memperhatikan kondisi suatu daerah seperti akses, luas wilayah, kondisi geografis dan IPM daerah perkotaan, sehingga tidak ada lagi alokasi dana yang sia-sia.

Sasaran 2
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	%	A	A	100	A	A	100
Rata-rata Capaian Kinerja					100			100

Sasaran 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator Kinerja :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/Dinas Kesehatan (AKIP)

Capaian kinerja nyata indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah nilai A dari target nilai A yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau mencapai target yang diperjanjikan. Capaian ini sama dengan tahun lalu .

Tabel 3.10
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas
Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		%
			Target	Realisasi	
5	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	%	A	A	100
Rata-rata Capaian Kinerja					100

Capaian kinerja sasaran 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh didukung oleh program Penunjang urusan pemerintah dengan kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Peningkatan Pelayanan BLUD

Output program dan kegiatan tersebut antara lain seperti tercantum dalam tabel berikut, dimana output tersebut menunjang / kurang menunjang pencapaian kinerja sasaran.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11

Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

N o	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang /Kurang
1	Program penunjang urusan daerah(Mandatori rutin)	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	152.650.950	141.056.040	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (Renstra, Renja, PK, RKT dll)	Menunjang
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	70.988.282.307	68.538.317.887	Jumlah pembayaran gaji ASN tepat waktu tepat waktu	Menunjang
		3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	659.569.850	624.278.822	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Menunjang
		4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	304.744.000	293.632.000	Jumlah peralatan mebel dan mesin yang disediakan	Menunjang
		5. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	1.071.391.080	1.016.574.175	Jumlah surat menyurat dan rekening utilisasi yang di bayarkan	Menunjang
		6. Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	332.968.000	305.281.476	Jumlah kendaraan dinas yang di bayarkan pajak dan di pelihara tepat waktu	Menunjang
		7. Peningkatan Pelayanan BLUD	93.761.433.752	91.340.406.082	Jumlah pelayanan	Menunjang

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kota Tahun 2024 disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Adanya dukungan dana baik APBD, DAK dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas di sarana pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
2. Tersedianya dukungan anggaran rutin DAU sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan di bidang (program kesehatan).

Faktor Penghambat :

1. Kurangnya koordinasi antar pengelola dalam merealisasikan kegiatan nya
2. Adanya kesenjangan harga pasar dengan standar harga yang ada di aplikasi

Upaya dan Rekomendasi tindak lanjut

1. Meningkatkan koordinasi dan komitmen antar bidang sampai ke UPT
2. Mengusulkan standar harga melalui survey pasar

2.4 Akuntabilitas Keuangan

Selama Tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh DPA Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp.202.702.011.755 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.194.752.669.318,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 96.08 %. Dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2024 rencana target kinerja dapat dicapai dengan kondisi anggaran silpa Rp. 7.949.342.437,- hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
Tahun 2024

No.	Misi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Misi 3, Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas melaui perbaikan mutu pendidikan,derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial	35.430.971.816	32.492.622.836	91,71
2	Misi 2, Mewujudkan tata pemerintah daerah yang baik,demokratis, berlandaskan hukum dan di laksanakan secar partisipatif	167.271.039.939.	162.259.546.482.	97.00

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh pada Tahun 2024.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.14
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
Tahun 2024

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Misi 1,	2			
1	Melebihi/Melampaui Target	1	50 %	32.492.622.836.	91,71

2	Sesuai Target	0	0 %		
3	Tidak Mencapai Target	1	50 %		
B.	Misi 2,	1		162.259.546.482	97.00
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0 %		
2	Sesuai Target	1	100 %		
3	Tidak Mencapai Target	0			

Pencapaian Misi pada Tahun 2024 merupakan pencapaian kinerja tahun pertama Renstra 2023-2026, dengan demikian diuraikan pula capaian misi berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai berikut :

Tabel 3.13
Penyerapan Anggaran pada setiap Misi Dinas Kesehatan
Kota Payakumbuh 2023-2026

No.	Misi	Pagu Indikatif Renstra (Rp.)	Realisasi Anggaran tahun ke-	Realisasi Anggaran tahun ke-	Jumlah	%(dari Pagu Indikatif)
			1	2		
A.	Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas melalui perbaikan mutu pendidikan,derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial	81.545.896.693	37,697,096,374	32.492.622.836	70,189,719,210.00	86

B.	Mewujudkan tata peemrintah daerah yang baik,demaokratis, berlandaskan hukum dan di laksanakan secar partisipatif	521.919.638.637	161,445,355,488	162.259.546.482	323,704,901,970.00	62
	Total	603.465.535.330	212,105,728,661	194,752,669,318	626.580.890.882,00	65

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh adalah 108,03 % dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut :

A. Prestasi Tingkat Nasional .

Tahun 2024 :

1. UHC Award
2. Sertifikasi Frambusia

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) di Kota Payakumbuh Tahun 2024. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan PerMenPan nomor 88 tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh menetapkan sebanyak 2(dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 116,7 % atau interpretasi sangat baik
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 % interpretasi baik

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (dua) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 202,702,011,755,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 194,752,669,318,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 96,08%. Dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2024 rencana target kinerja dapat dicapai dengan kondisi anggaran silpa Rp. 7,949,842,437,- Renstra Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh 2023-2026 menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja tersebut merupakan tahun pertama dari renstra yang dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan pada tahun

ke dua dari empat tahun yang direncanakan yaitu pada Tahun 2024, dengan rincian pencapaian sasaran seperti diatas.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp.194,752,669,318,-telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh adalah (96,08%) dari total anggaran renstra yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Payakumbuh.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Januari 2025
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PAYAKUMBUH,



Wawan Sofianto,SKM.M.Si
19811123 200312 1 006

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	0,5	0,35	70
		Prevalensi Stunting pada Balita	5,52	2,09	162,14
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Inspektorat	A	A	100

Jumlah anggaran kegiatan tahun 2024 Rp. 202,702,011,755

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024 Rp. 194,752,669,318 (96,08%)

Payakumbuh, Januari 2025
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PAYAKUMBUH,



Wawan Sofianto, SKM.M.Si
19811123 200312 1 006

**RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DINAS KESEHATAN**

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indek Keluarga Sehat	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 :0,6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase layanan UKP sesuai standar			100%	
		Pravelensi Stunting	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 :5,50		Persentase layanan UKM sesuai standar			100%	
						Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah sarana, prasarana, alat kesehatan dan penunjang fasilitas kesehatan yang disediakan sesuai standar	11 Unit Kerja	
						Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	TW 1 : - TW 2 : 1 unit TW 3 : - TW 4 :-	TW 1 : 153.850.800,00 TW 2 : 12.579.759.063,00
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	TW 1 : - TW 2 : 1 unit TW 3 : - TW 4 :-	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 3.560.100,00 TW 4 :
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	TW 1 : - TW 2 : 1 unit TW 3 : - TW 4 :-	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 7.183.650,00 TW 4 :
						Penggadaan alat kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	TW 1 : - TW 2 : 4 unit TW 3 : - TW 4 :-	TW 1 : 124.999.900,00 TW 2 : TW 3 : TW 4 :
						Pengadaan Obat, Nahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat , Bahan Habis Pakai, Bahan Media Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	TW 1 : - TW 2 : 1 paket TW 3 : 1 paket TW 4 :-	TW 1 : TW 2 : 4.985.475.818,00 TW 3 : TW 4 : 1.517.803.685,00
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	TW 1 : 21 keluarga TW 2 : 21 keluarga TW 3 : 21 keluarga TW 4 :22 keluarga	TW 1 : TW 2 : 23.738.000,00 TW 3 : TW 4 :
						Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Dasar & Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase kegiatan layanan kesehatan terlaksana sesuai standar	100%	
						Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	TW 1 : 752 orang TW 2 : 750 orang TW 3 : 750 orang TW 4 :750 orang	TW 1 : 19.115.800,00 TW 2 : 261.630.000,00 TW 3 :14.990.000,00 TW 4 :
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tiakar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	TW 1 : 21 orang TW 2 :21 orang TW 3 : 21 orang TW 4 :21 orang	TW 1 : 13.890.000,00 TW 2 : 12.500.000,00 TW 3 : 2.400.000,00 TW 4 :
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Payolansek	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	TW 1 : 22 orang TW 2 : 22 orang TW 3 : 22 orang TW 4 :22 orang	TW 1 : 5.986.000,00 TW 2 : 7.448.000,00 TW 3 : 5.866.000,00 TW 4 :782.000,00

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Ibu	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	TW 1 : 22 orang TW 2 : 22 orang TW 3 : 22 orang TW 4 : 22 orang	TW 1 : 5.624.000,00 TW 2 : 5.624.000,00 TW 3 : 5.624.000,00 TW 4 : 5.624.000,00
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Air Tabit	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	TW 1 : 45 orang TW 2 : 45 orang TW 3 : 45 orang TW 4 : 45 orang	TW 1 : 12.583.000,00 TW 2 : 6.291.500,00 TW 3 : 6.291.500,00 TW 4 :
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Parit Rantang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	TW 1 : 160 orang TW 2 : 160 orang TW 3 : 160 orang TW 4 : 160 orang	TW 1 : 3.327.500,00 TW 2 : 3.327.500,00 TW 3 : 6.655.000,00 TW 4 :
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tarok	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	TW 1 : 102 orang TW 2 : 102 orang TW 3 : 102 orang TW 4 : 102 orang	TW 1 : 6.000.000,00 TW 2 : 5.500.000,00 TW 3 : 5.281.000,00 TW 4 : 4.040.000,00
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Lampasi	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	TW 1 : 20 orang TW 2 : 20 orang TW 3 : 20 orang TW 4 : 20 orang	TW 1 : TW 2 : 10.275.000,00 TW 3 : 8.220.000,00 TW 4 : 2.740.000,00
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Padang Karambia	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	TW 1 : 67 orang TW 2 : 67 orang TW 3 : 67 orang TW 4 : 67 orang	TW 1 : 3.455.350,00 TW 2 : 10.840.000,00 TW 3 : 9.420.000,00 TW 4 : 5.420.000,00
						Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	TW 1 : 744 orang TW 2 : 741 orang TW 3 : 741 orang TW 4 : 741 orang	TW 1 : 35.957.250,00 TW 2 : 69.313.000,00 TW 3 : 33.600.000,00 TW 4 : 61.725.000,00
						Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	TW 1 : 3934 orang TW 2 : 3931 orang TW 3 : 3931 orang TW 4 : 3931 orang	TW 1 : 2.038.500,00 TW 2 : 56.982.800,00 TW 3 : 47.185.500,00 TW 4 :
						Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	TW 1 : 4950 orang TW 2 : 4947 orang TW 3 : 4947 orang TW 4 : 4947 orang	TW 1 : TW 2 : 32.909.900,00 TW 3 : 15.461.500,00 TW 4 :
						Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Tiakar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	TW 1 : 1334 orang TW 2 : 1334 orang TW 3 : 1334 orang TW 4 : 1334 orang	TW 1 : 16.915.000,00 TW 2 : 7.395.000,00 TW 3 : 7.480.000,00 TW 4 : 510.000,00
						Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Payolansek	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	TW 1 : 813 orang TW 2 : 813 orang TW 3 : 813 orang TW 4 : 813 orang	TW 1 : 26.945.000,00 TW 2 : TW 3 : 1.020.000,00 TW 4 :
						Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Ibu	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	TW 1 : 1500 orang TW 2 : 1500 orang TW 3 : 1500 orang TW 4 : 1500 orang	TW 1 : 7.508.333,00 TW 2 : 7.508.333,00 TW 3 : 7.508.334,00 TW 4 :
						Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Air Tabit	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	TW 1 : 767 orang TW 2 : 767 orang TW 3 : 767 orang TW 4 : 767 orang	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 15.000.000,00 TW 4 : 7.100.000,00
						Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Parit Rantang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	TW 1 : 770 orang TW 2 : 770 orang TW 3 : 770 orang TW 4 : 770 orang	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 15.000.000,00 TW 4 : 7.100.000,00
						Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Tarok	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	TW 1 : 1027 orang TW 2 : 1027 orang TW 3 : 1027 orang TW 4 : 1027 orang	TW 1 : 10.000.000,00 TW 2 : 10.000.000,00 TW 3 : 10.000.000,00 TW 4 : 6.720.000,00

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN
						Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Lampasi	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	TW 1 : 1384 orang TW 2 : 1384 orang TW 3 : 1384 orang TW 4 : 1384 orang	TW 1 : 5.100.000,00 TW 2 : 11.050.000,00 TW 3 : 12.750.000,00 TW 4 :
						Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Padang Karambia	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	TW 1 : 692 orang TW 2 : 692 orang TW 3 : 692 orang TW 4 : 692 orang	TW 1 : 9.690.000,00 TW 2 : 2.890.000,00 TW 3 : 5.865.000,00 TW 4 : 340.000,00
						Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	TW 1 : 21.489 orang TW 2 : 21.487 orang TW 3 : 21.487 orang TW 4 : 21.487 orang	TW 1 : 4.396.450,00 TW 2 : 7.273.750,00 TW 3 : 11.869.750,00 TW 4 : 7.273.750,00
						Pengelolaan Pelayanan kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	TW 1 : 4195 orang TW 2 : 4194 orang TW 3 : 4194 orang TW 4 : 4194 orang	TW 1 : 42.403.000,00 TW 2 : 50.126.550,00 TW 3 : 19.440.000,00 TW 4 : 4.040.000,00
						Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	TW 1 : 4799 orang TW 2 : 4797 orang TW 3 : 4797 orang TW 4 : 4797 orang	TW 1 : 900.800,00 TW 2 : 4.025.000,00 TW 3 : 4.325.000,00 TW 4 : 12.028.500,00
						Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	TW 1 : 364 orang TW 2 : 364 orang TW 3 : 364 orang TW 4 : 364 orang	TW 1 : 1.403.350,00 TW 2 : 13.281.300,00 TW 3 : 3.932.500,00 TW 4 : 2.522.500,00
						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	TW 1 : 77 orang TW 2 : 76 orang TW 3 : 76 orang TW 4 : 76 orang	TW 1 : 980.000,00 TW 2 : 12.170.000,00 TW 3 : TW 4 :
						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat ibu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	TW 1 : 37 orang TW 2 : 37 orang TW 3 : 37 orang TW 4 : 37 orang	TW 1 : 1.530.000,00 TW 2 : 1.530.000,00 TW 3 : 1.530.000,00 TW 4 : 1.530.000,00
						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat parit rantang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	TW 1 : 8 orang TW 2 : 8 orang TW 3 : 8 orang TW 4 : 8 orang	TW 1 : 700.000,00 TW 2 : 900.000,00 TW 3 : 900.000,00 TW 4 : 900.000,00
						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat payolasek	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	TW 1 : 4 orang TW 2 : 4 orang TW 3 : 4 orang TW 4 : 4 orang	TW 1 : 8.160.000,00 TW 2 : TW 3 : TW 4 :
						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat tiakar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	TW 1 : 11 orang TW 2 : 11 orang TW 3 : 11 orang TW 4 : 11 orang	TW 1 : 1.700.000,00 TW 2 : 3.400.000,00 TW 3 : 3.400.000,00 TW 4 : 1.700.000,00
						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat air tabit	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	TW 1 : 10 orang TW 2 : 10 orang TW 3 : 10 orang TW 4 : 10 orang	TW 1 : 1.275.000,00 TW 2 : 1.275.000,00 TW 3 : 1.275.000,00 TW 4 : 1.275.000,00
						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat tarok	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	TW 1 : 12 orang TW 2 : 12 orang TW 3 : 12 orang TW 4 : 12 orang	TW 1 : 3.060.000,00 TW 2 : 3.060.000,00 TW 3 : 3.060.000,00 TW 4 : 3.060.000,00
						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat lampasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	TW 1 : 5 orang TW 2 : 5 orang TW 3 : 5 orang TW 4 : 5 orang	TW 1 : 4.080.000,00 TW 2 : 4.080.000,00 TW 3 : 4.080.000,00 TW 4 : 4.080.000,00
						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat padang karambia	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	TW 1 : 8 orang TW 2 : 8 orang TW 3 : 8 orang TW 4 : 8 orang	TW 1 : 4.590.000,00 TW 2 : TW 3 : TW 4 :

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN
						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	TW 1 : 6 orang TW 2 : 6 orang TW 3 : 6 orang TW 4 : 6 orang	TW 1 : 108.472.350,00 TW 2 : 132.403.000,00 TW 3 : 42.706.000,00 TW 4 : 38.198.000,00
						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Tiakar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	TW 1 : 752 orang TW 2 : 752 orang TW 3 : 752 orang TW 4 : 752 orang	TW 1 : 5.440.000,00 TW 2 : 850.000,00 TW 3 : TW 4 :
						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Payolansek	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	TW 1 : 6 orang TW 2 : 6 orang TW 3 : 6 orang TW 4 : 6 orang	TW 1 : 3.230.000,00 TW 2 : 3.400.000,00 TW 3 : 3.400.000,00 TW 4 : 3.230.000,00
						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Ibh	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	TW 1 : 60 orang TW 2 : 60 orang TW 3 : 60 orang TW 4 : 60 orang	TW 1 : 1.360.000,00 TW 2 : 1.360.000,00 TW 3 : 1.360.000,00 TW 4 : 1.360.000,00
						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Air Tabit	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	TW 1 : 26 orang TW 2 : 24 orang TW 3 : 24 orang TW 4 : 24 orang	TW 1 : 1.190.000,00 TW 2 : 1.190.000,00 TW 3 : 1.190.000,00 TW 4 : 1.190.000,00
						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Parit Rantang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	TW 1 : 41 orang TW 2 : 41 orang TW 3 : 41 orang TW 4 : 41 orang	TW 1 : 1.100.000,00 TW 2 : 1.100.000,00 TW 3 : 1.200.000,00 TW 4 : 1.020.000,00
						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Tarok	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	TW 1 : 6 orang TW 2 : 6 orang TW 3 : 6 orang TW 4 : 6 orang	TW 1 : 1.445.000,00 TW 2 : 1.445.000,00 TW 3 : 1.445.000,00 TW 4 : 1.445.000,00
						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Lampasi	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	TW 1 : 6 orang TW 2 : 6 orang TW 3 : 6 orang TW 4 : 6 orang	TW 1 : 3.060.000,00 TW 2 : TW 3 : TW 4 :
						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis padang karambia	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	TW 1 : 77 orang TW 2 : 77 orang TW 3 : 77 orang TW 4 : 77 orang	TW 1 : 1.275.000,00 TW 2 : 1.275.000,00 TW 3 : 765.000,00 TW 4 :
						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	TW 1 : 935 orang TW 2 : 935 orang TW 3 : 935 orang TW 4 : 935 orang	TW 1 : 11.760.500,00 TW 2 : 77.263.900,00 TW 3 : 40.968.750,00 TW 4 : 7.358.750,00
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 2.292.000,00 TW 2 : 212.300.000,00 TW 3 : 18.270.000,00 TW 4 :
						Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat DKK	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	TW 1 : dokumen TW 2 : dokumen TW 3 : 1 dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 95.094.900,00 TW 2 : 230.083.450,00 TW 3 : 117.855.500,00 TW 4 : 110.468.000,00
						Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Tiakar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	TW 1 : dokumen TW 2 : 4 dokumen TW 3 : 2 dokumen TW 4 : 1 dokumen	TW 1 : 51.984.000,00 TW 2 : 24.430.000,00 TW 3 : 16.004.000,00 TW 4 : 4.420.000,00
						Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Payolansek	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	TW 1 : 2 dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 : 2 dokumen TW 4 : 1 dokumen	TW 1 : 7.055.000,00 TW 2 : 10.665.250,00 TW 3 : 68.915.700,00 TW 4 : 4.505.000,00
						Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Ibh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	TW 1 : 2 dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : 2 dokumen TW 4 : 2 dokumen	TW 1 : 7.055.000,00 TW 2 : 42.965.250,00 TW 3 : 41.315.000,00 TW 4 : 7.055.000,00

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN
						Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Air Tabit	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	TW 1 : 2 dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 : 2 dokumen TW 4 : 2 dokumen	TW 1 : 4.845.000,00 TW 2 : 72.281.750,00 TW 3 : 4.845.000,00 TW 4 :4.845.000,00
						Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Parit Rantang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	TW 1 : 2 dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 : 4 dokumen TW 4 : 2 dokumen	TW 1 : 2.519.950,00 TW 2 : 6.500.000,00 TW 3 : 39.408.750,00 TW 4 :34.015.000,00
						Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Tarok	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 27.099.000,00 TW 2 : 28.421.500,00 TW 3 : 27.099.000,00 TW 4 :26.879.000,00
						Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Lampasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	TW 1 : 10 dokumen TW 2 : 10 dokumen TW 3 : 10 dokumen TW 4 : 10 dokumen	TW 1 : 3.740.000,00 TW 2 : 71.188.000,00 TW 3 : 6.375.000,00 TW 4 :4.420.000,00
						Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Padang Karambia	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	TW 1 : 2 dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 : 2 dokumen TW 4 : 1 dokumen	TW 1 : 7.395.000,00 TW 2 : 61.893.950,00 TW 3 : 23.100.000,00 TW 4 :7.140.000,00
						Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga dkk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	TW 1 : dokumen TW 2 : dokumen TW 3 : 1 dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 11.879.750,00 TW 2 : 10.275.500,00 TW 3 : 20.625.000,00 TW 4 :11.463.250,00
						Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga ibu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : 4 dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : TW 2 : 1.360.000,00 TW 3 : TW 4 :
						Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga parit rantang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	TW 1 : 4 dokumen TW 2 : 4 dokumen TW 3 : 4 dokumen TW 4 : 4 dokumen	TW 1 : TW 2 : 4.080.000,00 TW 3 : TW 4 :
						Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga payolansek	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : 1 dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : TW 2 : 1.020.000,00 TW 3 : TW 4 :
						Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga tiakar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	TW 1 : 2 dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : 1 dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 1.275.000,00 TW 2 : TW 3 : TW 4 :
						Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga air tabit	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	TW 1 : 2 dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 510.000,00 TW 2 : 255.000,00 TW 3 : 255.000,00 TW 4 :
						Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga tarok	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	TW 1 : 4 dokumen TW 2 : 4 dokumen TW 3 : 4 dokumen TW 4 : 4 dokumen	TW 1 : 3.000.000,00 TW 2 : 3.120.000,00 TW 3 : TW 4 :
						Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga lampasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	TW 1 : 2 dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 765.000,00 TW 2 : 1.500.000,00 TW 3 : 850.000,00 TW 4 :285.000,00
						Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga padang karambia	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : TW 2 : 340.000,00 TW 3 : TW 4 :
						Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	TW 1 : dokumen TW 2 : dokumen TW 3 : 1 dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 15.064.500,00 TW 2 : 21.674.500,00 TW 3 : 32.161.800,00 TW 4 :

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN
						Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Tiakar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : 1 dokumen TW 4 : 2 dokumen	TW 1 : 850.000,00 TW 2 : 5.950.000,00 TW 3 : 850.000,00 TW 4 : 850.000,00
						Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Payolansek	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	TW 1 : dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : TW 2 : 2.040.000,00 TW 3 : 3.570.000,00 TW 4 : 6.120.000,00
						Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Ibu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	TW 1 : 2 dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 2.295.000,00 TW 2 : 2.295.000,00 TW 3 : 2.295.000,00 TW 4 : 2.295.000,00
						Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Air Tabit	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	TW 1 : dokumen TW 2 : 4 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 2.125.000,00 TW 2 : 1.062.500,00 TW 3 : 1.062.500,00 TW 4 :
						Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Parit rantang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	TW 1 : 2 dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 1.275.000,00 TW 2 : 1.275.000,00 TW 3 : 5.100.000,00 TW 4 :
						Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Tarok	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	TW 1 : 2 dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 : 1 dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 2.000.000,00 TW 2 : 3.000.000,00 TW 3 : 2.180.000,00 TW 4 : 2.000.000,00
						Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Lampasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 4.590.000,00 TW 2 : 4.590.000,00 TW 3 : 2.040.000,00 TW 4 : 2.040.000,00
						Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Padang Karambia	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	TW 1 : dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 : 1 dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 1.360.000,00 TW 2 : 2.040.000,00 TW 3 : 2.040.000,00 TW 4 : 1.020.000,00
						Pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 50.734.200,00 TW 2 : 85.052.000,00 TW 3 : 387.992.900,00 TW 4 : 26.725.000,00
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 11.847.500,00 TW 2 : TW 3 : TW 4 :
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 27.189.000,00 TW 2 : 11.197.500,00 TW 3 : 9.555.600,00 TW 4 : 5.090.000,00
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan Tiakar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 2.550.000,00 TW 2 : TW 3 : TW 4 :
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan Payolansek	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	TW 1 : dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 : 1 dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 510.000,00 TW 2 : 1.601.400,00 TW 3 : 765.000,00 TW 4 :
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan Ibu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 425.000,00 TW 2 : 425.000,00 TW 3 : TW 4 :
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan Air tabit	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	TW 1 : dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 4.250.000,00 TW 2 : 2.125.000,00 TW 3 : 2.125.000,00 TW 4 :

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan Parit Rintang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	TW 1 : 2 dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 : 2 dokumen TW 4 : 2 dokumen	TW 1 : 500.000,00 TW 2 : 1.294.000,00 TW 3 : 800.000,00 TW 4 : 755.000,00
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan Tarok	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	TW 1 : 2 dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 : 2 dokumen TW 4 : 4 dokumen	TW 1 : 1.000.000,00 TW 2 : 1.550.000,00 TW 3 : TW 4 :
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan Lampasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	TW 1 : 2 dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : 4 dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 2.397.000,00 TW 2 : TW 3 : TW 4 :
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan Padang Karambia	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 1.530.000,00 TW 2 : 2.550.000,00 TW 3 : 2.040.000,00 TW 4 : 1.530.000,00
						Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	TW 1 : 4018 orang TW 2 : 4018 orang TW 3 : 4018 orang TW 4 : 4018 orang	TW 1 : 2.213.200,00 TW 2 : 1.360.000,00 TW 3 : 680.000,00 TW 4 : 425.000,00
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) ibuh	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	TW 1 : 87 orang TW 2 : 87 orang TW 3 : 87 orang TW 4 : 87 orang	TW 1 : 1.912.500,00 TW 2 : 1.912.500,00 TW 3 : 1.912.500,00 TW 4 : 1.912.500,00
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) parit rantang	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	TW 1 : 27 orang TW 2 : 27 orang TW 3 : 27 orang TW 4 : 27 orang	TW 1 : TW 2 : 2.500.000,00 TW 3 : 2.600.000,00 TW 4 :
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) payolansek	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	TW 1 : 7 orang TW 2 : 7 orang TW 3 : 7 orang TW 4 : 7 orang	TW 1 : 3.060.000,00 TW 2 : TW 3 : TW 4 :
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) tiakar	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	TW 1 : 1006 orang TW 2 : 1006 orang TW 3 : 1006 orang TW 4 : 1006 orang	TW 1 : 2.890.000,00 TW 2 : 2.890.000,00 TW 3 : TW 4 :
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) air tabit	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	TW 1 : 12 orang TW 2 : 12 orang TW 3 : 12 orang TW 4 : 12 orang	TW 1 : 1.020.000,00 TW 2 : 1.020.000,00 TW 3 : 1.020.000,00 TW 4 : 1.020.000,00
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) tarok	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	TW 1 : 756 orang TW 2 : 756 orang TW 3 : 756 orang TW 4 : 756 orang	TW 1 : 1.500.000,00 TW 2 : 2.000.000,00 TW 3 : 2.000.000,00 TW 4 : 280.000,00
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) lampasi	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	TW 1 : 87 orang TW 2 : 87 orang TW 3 : 87 orang TW 4 : 87 orang	TW 1 : 1.275.000,00 TW 2 : 1.275.000,00 TW 3 : 1.275.000,00 TW 4 : 1.275.000,00
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) padang karambia	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	TW 1 : 6 orang TW 2 : 6 orang TW 3 : 6 orang TW 4 : 6 orang	TW 1 : 2.040.000,00 TW 2 : TW 3 : TW 4 :
						Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 83.989.000,00 TW 2 : 40.967.082,00 TW 3 : 150.134.332,00 TW 4 : 108.837.086,00
						Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Tiakar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 23.290.000,00 TW 2 : 22.683.750,00 TW 3 : 18.360.000,00 TW 4 : 12.750.000,00

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN
						Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Payolansek	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	TW 1 : 2 dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 : 2 dokumen TW 4 : 2 dokumen	TW 1 : 10.030.000,00 TW 2 : 24.089.500,00 TW 3 : 11.220.000,00 TW 4 : 7.990.000,00
						Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Ibu	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 14.052.938,00 TW 2 : 14.052.938,00 TW 3 : 14.054.938,00 TW 4 : 13.960.936,00
						Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Air Tabit	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 38.454.000,00 TW 2 : 16.490.000,00 TW 3 : 16.490.000,00
						Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Parit Rantang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	TW 1 : 9 dokumen TW 2 : 9 dokumen TW 3 : 9 dokumen TW 4 : 9 dokumen	TW 1 : 10.979.650,00 TW 2 : 10.500.000,00 TW 3 : 10.470.000,00 TW 4 : 10.000.000,00
						Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Tarok	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 21.547.500,00 TW 2 : 24.876.750,00 TW 3 : 21.547.500,00 TW 4 : 21.547.500,00
						Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Lampasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	TW 1 : 10 dokumen TW 2 : 10 dokumen TW 3 : 10 dokumen TW 4 : 10 dokumen	TW 1 : 15.555.000,00 TW 2 : 22.282.750,00 TW 3 : 17.170.000,00 TW 4 : 14.365.000,00
						Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Padang Karambia	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	TW 1 : 2 dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 : 2 dokumen TW 4 : 2 dokumen	TW 1 : 15.871.950,00 TW 2 : 23.038.750,00 TW 3 : 16.830.000,00 TW 4 : 10.200.000,00
						Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular tiakar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 23.290.000,00 TW 2 : 22.683.750,00 TW 3 : 18.360.000,00 TW 4 : 12.750.000,00
						Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional yang di distribusikan	TW 1 : paket TW 2 : 2 paket TW 3 : paket TW 4 : paket	TW 1 : 65.315.000,00 TW 2 : 72.110.000,00 TW 3 : 80.102.500,00 TW 4 : 49.487.500,00
						Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 8.819.866.750,00 TW 2 : 8.814.728.300,00
						Penyelenggaraan kabupaten/ kota sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kabupaten/ kota sehat	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 76.961.000,00 TW 2 : 4.973.850,00 TW 3 : 15.226.400,00 TW 4 : 21.666.500,00
						Operasional pelayanan Puskesmas Tiakar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 41.124.500,00 TW 2 : 41.124.500,00 TW 3 : 42.624.500,00 TW 4 : 40.924.500,00
						Operasional pelayanan Puskesmas Payolansek	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	TW 1 : 1 dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : 1 dokumen TW 4 : 2 dokumen	TW 1 : 39.555.500,00 TW 2 : 39.555.500,00 TW 3 : 38.025.500,00 TW 4 : 39.522.500,00
						Operasional pelayanan Puskesmas Ibu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 39.375.250,00 TW 2 : 39.375.250,00 TW 3 : 39.375.250,00 TW 4 : 39.375.250,00
						Operasional pelayanan Puskesmas Air Tabit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 42.553.500,00 TW 2 : 36.603.500,00 TW 3 : 56.327.750,00 TW 4 : 10.929.250,00

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN
						Operasional pelayanan Puskesmas Tarok	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	TW 1 : 9 dokumen TW 2 : 9 dokumen TW 3 : 9 dokumen TW 4 : 9 dokumen	TW 1 : 47.758.750,00 TW 2 : 47.758.750,00 TW 3 : 47.758.750,00 TW 4 : 47.758.750,00
						Operasional pelayanan Puskesmas Parit rantang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	TW 1 : 13 dokumen TW 2 : 13 dokumen TW 3 : 13 dokumen TW 4 : 13 dokumen	TW 1 : 29.300.000,00 TW 2 : 34.300.000,00 TW 3 : 34.525.000,00 TW 4 : 34.841.000,00
						Operasional pelayanan Puskesmas Lampasi	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	TW 1 : 16 dokumen TW 2 : 16 dokumen TW 3 : 16 dokumen TW 4 : 16 dokumen	TW 1 : 43.323.000,00 TW 2 : 43.323.000,00 TW 3 : 43.323.000,00 TW 4 : 25.641.000,00
						Operasional pelayanan Puskesmas Padang Karambia	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 37.315.750,00 TW 2 : 39.355.750,00 TW 3 : 39.355.750,00 TW 4 : 37.315.750,00
						Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 109.724.800,00 TW 2 : 72.115.500,00 TW 3 : TW 4 :
						Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	TW 1 : unit TW 2 : 1 unit TW 3 : unit TW 4 : unit	TW 1 : 231.264.100,00 TW 2 : 478.690.000,00 TW 3 : 194.291.150,00 TW 4 : 53.750.000,00
						Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya parit rantang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	TW 1 : dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : TW 2 : 2.143.000,00 TW 3 : 2.080.000,00 TW 4 : 2.080.000,00
						Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya payolansék	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	TW 1 : dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 8.105.250,00 TW 4 :
						Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya tiakar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	TW 1 : 1 dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : 1 dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 2.080.000,00 TW 2 : 2.080.000,00 TW 3 : 2.080.000,00 TW 4 :
						Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya air tabit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	TW 1 : dokumen TW 2 : 3dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 6.830.500,00 TW 2 : TW 3 : TW 4 :
						Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya lampasi	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	TW 1 : dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 3.583.000,00 TW 2 : TW 3 : 3.583.000,00 TW 4 : 3.583.000,00
						Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya padang karambia	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	TW 1 : dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 2.080.000,00 TW 2 : 2.080.000,00 TW 3 : TW 4 : 2.080.000,00
						Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria tiakar	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	TW 1 : 3 orang TW 2 : 3 orang TW 3 : 3 orang TW 4 : 3 orang	TW 1 : 850.000,00 TW 2 : TW 3 : TW 4 :
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Padang Karambia	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 395.550,00 TW 2 : 377.000,00 TW 3 : TW 4 :

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Ibu	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 813.750,00 TW 2 : 813.750,00 TW 3 : 813.750,00 TW 4 : 813.750,00
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Parit Rantang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	TW 1 : dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : TW 2 : 6.875.000,00 TW 3 : TW 4 : 6.945.000,00
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Air Tabit	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : TW 2 : 938.000,00 TW 3 : TW 4 :
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Lampasi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	TW 1 : 2 dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 : 2 dokumen TW 4 : 2 dokumen	TW 1 : 388.500,00 TW 2 : 388.500,00 TW 3 : TW 4 : 388.500,00
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Tarok	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	TW 1 : dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : TW 2 : 892.000,00 TW 3 : TW 4 :
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Tiakar	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 1.007.000,00 TW 2 : TW 3 : TW 4 :
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi payolansek	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : 1 dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : TW 2 : 1.154.000,00 TW 3 : TW 4 :
						Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan ibu	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	TW 1 : 90 dokumen TW 2 : 90 dokumen TW 3 : 90 dokumen TW 4 : 90 dokumen	TW 1 : 765.000,00 TW 2 : 765.000,00 TW 3 : 765.000,00 TW 4 : 765.000,00
						Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan parit rantang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 510.000,00 TW 2 : 510.000,00 TW 3 : 510.000,00 TW 4 : 510.000,00
						Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan payolansek	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	TW 1 : 724 dokumen TW 2 : 724 dokumen TW 3 : 724 dokumen TW 4 : 724 dokumen	TW 1 : 765.000,00 TW 2 : 765.000,00 TW 3 : 765.000,00 TW 4 : 765.000,00
						Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan tiakar	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	TW 1 : 695 dokumen TW 2 : 695 dokumen TW 3 : 695 dokumen TW 4 : 695dokumen	TW 1 : 1.020.000,00 TW 2 : TW 3 : 1.020.000,00 TW 4 :
						Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan air tabit	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 510.000,00 TW 2 : 510.000,00 TW 3 : 510.000,00 TW 4 : 510.000,00
						Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan tarok	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 : 510.000,00 TW 2 : 510.000,00 TW 3 : 510.000,00 TW 4 : 510.000,00
						Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan lampasi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3dokumen	TW 1 : 510.000,00 TW 2 : 510.000,00 TW 3 : 510.000,00 TW 4 : 510.000,00

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN
						Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan padang karambia	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 510.000,00 TW 2 : 1.530.000,00 TW 3 : 1.020.000,00 TW 4 :
						Pengelolaan Layanan Imunisasi ibuh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 :12.048.750,00 TW 2 :12.048.750,00 TW 3 :12.048.750,00 TW 4 :12.048.750,00
						Pengelolaan Layanan Imunisasi parit rantang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	TW 1 : 7 dokumen TW 2 : 7 dokumen TW 3 : 7 dokumen TW 4 : 7 dokumen	TW 1 : 6.725.000,00 TW 2 : 16.000.000,00 TW 3 : 17.000.000,00 TW 4 :10.000.000,00
						Pengelolaan Layanan Imunisasi payolansek	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	TW 1 : 575 dokumen TW 2 : 575 dokumen TW 3 : 575 dokumen TW 4 : 575 dokumen	TW 1 : 7.650.000,00 TW 2 : 7.650.000,00 TW 3 : 14.110.000,00 TW 4 :11.730.000,00
						Pengelolaan Layanan Imunisasi tiakar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	TW 1 : 26 dokumen TW 2 : 26 dokumen TW 3 : 26 dokumen TW 4 : 26dokumen	TW 1 : 6.375.000,00 TW 2 : 12.155.000,00 TW 3 : 9.945.000,00 TW 4 :7.480.000,00
						Pengelolaan Layanan Imunisasi air tabit	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	TW 1 : dokumen TW 2 : 4 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 6.757.500,00 TW 2 : 6.757.500,00 TW 3 : 6.757.500,00 TW 4 :6.757.500,00
						Pengelolaan Layanan Imunisasi tarok	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	TW 1 : 4 dokumen TW 2 : 4 dokumen TW 3 : 4 dokumen TW 4 : 4 dokumen	TW 1 : 8.988.750,00 TW 2 : 8.988.750,00 TW 3 : 8.988.750,00 TW 4 :8.988.750,00
						Pengelolaan Layanan Imunisasi lampasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	TW 1 : 4 dokumen TW 2 : 4 dokumen TW 3 : 4 dokumen TW 4 : 4 dokumen	TW 1 : 11.050.000,00 TW 2 : 6.630.000,00 TW 3 : 11.730.000,00 TW 4 :6.460.000,00
						Pengelolaan Layanan Imunisasi padang karambia	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	TW 1 : 301 dokumen TW 2 : 301 dokumen TW 3 : 301 dokumen TW 4 : 301 dokumen	TW 1 : 12.240.000,00 TW 2 : 5.100.000,00 TW 3 : 8.500.000,00 TW 4 :8.500.000,00
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 4.384.450,00 TW 2 : 13.779.000,00 TW 3 : TW 4 :
						Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	TW 1 : dokumen TW 2 : 4 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : TW 2 : 38.750.000,00 TW 3 : 7.700.000,00 TW 4 :
						Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Padang Karambia	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	TW 1 : dokumen TW 2 : 5 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 595.000,00 TW 2 : 595.000,00 TW 3 : 255.000,00 TW 4 :595.000,00
						Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Ibul	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	TW 1 : dokumen TW 2 : 5 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 :425.000,00 TW 2 :425.000,00 TW 3 :425.000,00 TW 4 :
						Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Parit Rantang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	TW 1 : 2 dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 :2 dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 :526.950,00 TW 2 :700.000,00 TW 3 : 1.095.000,00 TW 4 :

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN
						Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Air Tabit	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	TW 1 : dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 :2 dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 680.000,00 TW 2 : 340.000,00 TW 3 : 340.000,00 TW 4 :
						Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Lampasi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	TW 1 : 1 dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 :2 dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 850.000,00 TW 2 : 170.000,00 TW 3 : TW 4 :
						Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Tarok	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	TW 1 : 1 dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 :2 dokumen TW 4 : 1 dokumen	TW 1 : 1.445.000,00 TW 2 : TW 3 : TW 4 :
						Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Tiakar	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	TW 1 : dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 :2 dokumen TW 4 : 1 dokumen	TW 1 : 1.358.700,00 TW 2 : TW 3 : TW 4 :
						Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Payolansek	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 :1.530.000,00 TW 2 : 1.020.000,00 TW 3 : TW 4 :
						Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Jumlah dokumen pengelolaan Informasi Kesehatan yang tersedia	3 Dokumen	
						Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (dkk)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	TW 1 : dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 :2 dokumen TW 4 : 2 dokumen	TW 1 : 19.325.000,00 TW 2 :38.650.000,00 TW 3 :57.975.000,00 TW 4 :
						Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RS sesuai standar yang diterbitkan izin operasional	4 Dokumen	
						Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	TW 1 : dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 :2 dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 19.656.200,00 TW 2 :17.318.500,00 TW 3 : TW 4 :
						Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	TW 1 : dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 :2 dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 9.282.100,00 TW 2 : TW 3 : TW 4 :
						Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	TW 1 : dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 :2 dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 3.581.600,00 TW 2 : 173.800.500,00 TW 3 : TW 4 :
						Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	TW 1 : dokumen TW 2 :1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 191.100,00 TW 2 : 15.423.750,00 TW 3 : TW 4 :
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan sesuai standar			100%	
						Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM manusia di wilayah kabupaten / kota	Jumlah dokumen SDM Kesehatan yang tersedia	2 Dokumen	

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN
						Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	TW 1 : orang TW 2 : 2 orang TW 3 : orang TW 4 : orang	TW 1 : 5.001.000,00 TW 2 : TW 3 : TW 4 :
						Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten / kota	Jumlah SDM Kesehatan yang meningkat kompetensinya	5 orang	
						Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten / kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	TW 1 : orang TW 2 : 30 orang TW 3 : orang TW 4 : orang	TW 1 : TW 2 : 548.689.650,00 TW 3 : 228.176.000,00 TW 4 :
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotik ,toko obat, dll) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan			100%	
					2. Persentase kegiatan pengawasan keamanan makanan dan minuman			100%	
						Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen izin fasilitas pelayanan kafarmasiaan yang diterbitkan	1 dokumen	
						Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 56.740.000,00 TW 2 : TW 3 : TW 4 :
						Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan nomor P- IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan minuman tertentu yang dapat di produksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen Sertifikat P- IRT yang diterbitkan	1 dokumen	
						Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan nomor P- IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan minuman tertentu yang dapat di produksi oleh Industri Rumah Tangga DKK	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	TW 1 : 3 dokumen TW 2 : 3 dokumen TW 3 : 3 dokumen TW 4 : 3 dokumen	TW 1 :217.115.400,00 TW 2 : 137.174.500,00 TW 3 :81.653.000,00 TW 4 :
						Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah dokumen sertifikat laik sehat yang tersedia	1 dokumen	
						Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 2.705.200,00 TW 2 : 12.535.250,00 TW 3 : TW 4 :
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.Persentase pelaksanaan GERMAS pada masyarakat			100%	

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN
					<i>1.Persentase pelaksanaan pembinaan UKBM</i>			<i>100%</i>	
						Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten / kota	Jumlah dokumen kegiatan advokasi dan kemitraan masyarakat yang tersedia	3 Dokumen	
						Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi kementerian dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 :426.303.200,00 TW 2 : 220.575.000,00 TW 3 :220.575.000,00 TW 4 :220.575.000,00
						Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten / kota	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Promkes yang tersedia	3 Dokumen	
						Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	TW 1 : dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 18.815.800,00 TW 2 : 6.800.000,00 TW 3 : 14.852.500,00 TW 4 :29.280.500,00
						Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten / kota	Jumlah dokumen pelaksanaan UKBM yang tersedia	3 Dokumen	
						Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) DKK	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 50.578.150,00 TW 2 : 38.000.000,00 TW 3 : 80.781.000,00 TW 4 :
						Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Tiakar	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : 1 dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 7.838.550,00 TW 2 : TW 3 : TW 4 :
						Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Payolansek	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 5.542.800,00 TW 4 :
						Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Ibhuh	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	TW 1 : dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 4.753.900,00 TW 2 : TW 3 : TW 4 :
						Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Air Tabit	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 3.211.700,00 TW 2 : TW 3 : TW 4 :
						Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Parit Rantang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 :6.945.000,00 TW 2 : TW 3 : TW 4 :
						Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Tarok	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : 1 dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 49.750,00 TW 2 : 4.955.500,00 TW 3 : TW 4 :
						Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Lampasi	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : 5.742.650,00 TW 2 : TW 3 : TW 4 :

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN
						Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Padang Karambia	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	TW 1 : dokumen TW 2 : 1 dokumen TW 3 : dokumen TW 4 : dokumen	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 1.776.000,00 TW 4 :
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	AA	Program Penunjang Urusan Pemerintah	1. Nilai IKM Dinkes			89	
					2. Persentase peningkatan Pelayanan BLUD			AA	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang tersusun	7 dokumen	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	TW 1 : 2 dokumen TW 2 :2 dokumen TW 3 :1 dokumen TW 4 : 1 dokumen	TW 1 :16.192.900,00 TW 2 :17.722.500,00 TW 3 :28.300.400,00 TW 4 :14.544.850,00
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TW 1 : 10 laporan TW 2 : 10 laporan TW 3 : 10 laporan TW 4 : 10 laporan	TW 1 : 13.539.750,00 TW 2 : 20.027.500,00 TW 3 : 21.902.500,00 TW 4 :11.216.400,00
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersedia	3 dokumen	

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	TW 1 : 196 orang TW 2 : 196 orang TW 3 : 196 orang TW 4 : 198 orang	TW 1 : 27.591.677.954,00 TW 2 : 17.597.911.167,00 TW 3 : 16.135.905.291,00
						Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	TW 1 : 2 dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 : 4 dokumen TW 4 : 4 dokumen	TW 1 :127.100.000,00 TW 2 :126.400.000,00 TW 3 :127.008.000,00 TW 4 :126.228.000,00
						Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	TW 1 : 2 dokumen TW 2 : 2 dokumen TW 3 : 4 dokumen TW 4 : 4 dokumen	TW 1 :10.200.000,00 TW 2 :10.200.000,00 TW 3 :10.200.000,00 TW 4 :6.415.000,00
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapan yang tersedia	1 paket	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	TW 1 : paket TW 2 : 430 paket TW 3 : paket TW 4 : paket	TW 1 : TW 2 : 438.974.750,00 TW 3 : TW 4 :
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kegiatan administrasi perkantoran yang tersedia	3 dokumen	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	TW 1 : paket TW 2 :1 paket TW 3 : paket TW 4 : paket	TW 1 : 10.000.000,00 TW 2 : TW 3 : TW 4 :
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	TW 1 : paket TW 2 :1 paket TW 3 : paket TW 4 : paket	TW 1 : TW 2 : 62.688.000,00 TW 3 : 56.700,00 TW 4 :
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	TW 1 : paket TW 2 :1 paket TW 3 : paket TW 4 : paket	TW 1 : 48.222.000,00 TW 2 : 474.000,00 TW 3 : 474.000,00 TW 4 :474.000,00
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	TW 1 : paket TW 2 :1 paket TW 3 : paket TW 4 : paket	TW 1 : 15.986.000,00 TW 2 : TW 3 : 2.870.000,00 TW 4 :2.870.000,00
						Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	TW 1 : - laporan TW 2 : 5 laporan TW 3 : 5 laporan TW 4 : 2 laporan	TW 1 : 3.000.000,00 TW 2 : 2.000.000,00 TW 3 : 2.000.000,00 TW 4 :1.050.000,00
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TW 1 : 33 laporan TW 2 : 33 laporan TW 3 : 33 laporan TW 4 : 35 laporan	TW 1 : 70.000.000,00 TW 2 : 65.000.000,00 TW 3 : 65.000.000,00 TW 4 :47.786.000,00
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		10 unit	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	TW 1 : unit TW 2 : 9 unit TW 3 : unit TW 4 : unit	TW 1 : TW 2 : 229.373.000,00 TW 3 : 10.000.000,00 TW 4 :8.327.000,00
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	TW 1 : unit TW 2 : unit TW 3 : 97 unit TW 4 : unit	TW 1 : TW 2 :305.870.000,00 TW 3 : TW 4 :

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	TW 1 : unit TW 2 : unit TW 3 : 1 unit TW 4 : unit	TW 1 : TW 2 : 100.000.000,00 TW 3 : TW 4 :
						Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan kegiatan penunjang perkantoran yang tersedia	3 laporan	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	TW 1 : 9 laporan TW 2 : 9 laporan TW 3 : 9 laporan TW 4 : 9 laporan	TW 1 : 84.300.000,00 TW 2 : 74.300.000,00 TW 3 : 68.000.000,00 TW 4 : 67.041.436,00
						Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	TW 1 : 3 laporan TW 2 : 3 laporan TW 3 : 3 laporan TW 4 : 3 laporan	TW 1 : 292.284.800,00 TW 2 : 290.375.000,00 TW 3 : 290.275.000,00 TW 4 : 290.267.040,00
						Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang milik daerah yang dipelihara	20 unit	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	TW 1 : unit TW 2 : unit TW 3 : 1 unit TW 4 : unit	TW 1 : 15.000.000,00 TW 2 : 15.000.000,00 TW 3 : 6.500.000,00 TW 4 : 6.450.000,00
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	TW 1 : 4 unit TW 2 : 4 unit TW 3 : 4 unit TW 4 : 4 unit	TW 1 : 90.000.000,00 TW 2 : 111.759.800,00 TW 3 : 110.000.000,00 TW 4 : 67.740.000,00
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	TW 1 : 2 unit TW 2 : 2 unit TW 3 : 4 unit TW 4 : 2 unit	TW 1 : 9.350.000,00 TW 2 : 8.529.900,00 TW 3 : 3.050.000,00 TW 4 :
						Peningkatan pelayanan BLUD	jumlah blud yang tersedia untuk pelayan dan penunjang pelayanan	9 unit kerja	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Adnan WD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	TW 1 : - unit TW 2 : 1 unit kerja TW 3 : - unit TW 4 : - unit	TW 1 : 21.770.999.994,00 TW 2 : 22.070.999.994,00
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ibul	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	TW 1 : - unit TW 2 : 1 unit kerja TW 3 : - unit TW 4 : - unit	TW 1 : 389.379.461,00 TW 2 : 389.379.462,00 TW 3 : 340.812.962,00 TW 4 : 340.812.963,00
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas parit Rantang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	TW 1 : - unit TW 2 : 1 unit kerja TW 3 : - unit TW 4 : - unit	TW 1 : 304.300.000,00 TW 2 : 232.850.000,00 TW 3 : 232.950.000,00 TW 4 : 232.951.463,00
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Payolasek	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	TW 1 : - unit TW 2 : 1 unit kerja TW 3 : - unit TW 4 : - unit	TW 1 : 272.037.900,00 TW 2 : 254.856.900,00 TW 3 : 254.856.900,00 TW 4 : 254.856.295,00

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA ANGGARAN
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tiakar	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	TW 1 : - unit TW 2 : 1 unit kerja TW 3 : - unit TW 4 : - unit	TW 1 : 357.324.000,00 TW 2 : 291.584.000,00 TW 3 : 226.139.000,00 TW 4 : 200.613.000,00
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Air Tabit	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	TW 1 : - unit TW 2 : 1 unit kerja TW 3 : - unit TW 4 : - unit	TW 1 : 371.150.900,00 TW 2 : 289.276.250,00 TW 3 : 289.276.250,00 TW 4 : 207.401.600,00
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tarok	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	TW 1 : - unit TW 2 : 1 unit kerja TW 3 : - unit TW 4 : - unit	TW 1 : 372.293.497,00 TW 2 : 381.293.497,00 TW 3 : 372.293.497,00 TW 4 : 363.296.509,00
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Lampasi	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	TW 1 : - unit TW 2 : 1 unit kerja TW 3 : - unit TW 4 : - unit	TW 1 : 338.750.000,00 TW 2 : 338.750.000,00 TW 3 : 338.750.000,00 TW 4 : 338.750.000,00
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Padang Karambia	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	TW 1 : - unit TW 2 : 1 unit kerja TW 3 : - unit TW 4 : - unit	TW 1 : 878.622.000,00 TW 2 : TW 3 : TW 4 :

Payakumbuh, Januari 2025

Kepala Dinas Kesehatan Kota



Wawan Sofianto, SKM.M.Si

NIP. 19811123 200312 1 006

RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS KESEHATAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indek Keluarga Sehat	0.6
	Prevalensi Stunting Pada Balita	5,50
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kesehatan	AA

Payakumbuh, Desember 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PAYAKUMBUH



Wawan Sofianto,SKM.M.Si
NIP. 19811123 200312 1 006

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

KOTA : PAYAKUMBUH
 PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN KOTA PAYAKUMBUH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indek Keluarga Sehat dan Prevalensi Stunting Pada Balita	0,5 dan 5,50	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyakat	Rp. 33.225.884.964,-	Rp. 30.622.385.846,-	92,16 %
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 788.345.952,-	Rp 621.702.565,-	78,86 %
				Sediaan Farmasi,Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 378.944.000,-	Rp. 271.127.925,-	71,55 %
				Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 1.037.796.900,-	Rp. 977.906.500,-	94,23 %
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 167.271.039.939,-	Rp.162.259.546.482,-	97,00%

	Kesehatan Kota Payakumbuh						
				Jumlah	Rp. 202.702.011.755,-	Rp.194.752.669.318,-	96,08 %

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2024 : Rp. 202.702.011.755,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024 : Rp. 194.752.669.318,- (96,08%)

Payakumbuh, Januari 2025
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PAYAKUMBUH



Wawan Sofianto,SKM.M.Si
NIP. 19811123 200312 1 006